

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI DESA DAMPAKNYA TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN

Afrizal Batubara^{1*}, Rina Malahayati², Gundahara³

^{1,2,3} Universitas Gunung Leuser

Article Info

Article history:

Received Nov 25, 2025

Revised Nov 09, 2025

Accepted Nov 28, 2025

Keywords:

Accrual Based Accounting
System,
Financial Transparency,
Accountability

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the Implementation of Accrual-Based Accounting System (SA-Akrual) on Financial Transparency in Kuta Mijeje Village, Southeast Aceh. The research background is driven by the demands of good governance and the substantial allocation of Village Funds, which require accountable and transparent management. The research method employed a quantitative approach with data collection through questionnaires distributed to 40 respondents comprising village officials and community leaders. Data were analyzed using simple linear regression with the help of SPSS 25. The results prove that the Implementation of SA-Akrual has a positive and significant effect on Financial Transparency, as indicated by a regression coefficient of 0.648 and a significance of 0.000. The SA-Akrual variable contributes 41.2% to explaining the variation in Financial Transparency, while the remaining 58.8% is influenced by other factors outside the model. Qualitative findings reveal that the mechanism of influence occurs through process standardization, improved information quality, and the creation of a clear audit trail. Key supporting factors include the leadership commitment of the village head and community participation. This study concludes that SA-Akrual acts as a catalyst for transparency but needs to be supported by enhanced human resource capacity and more effective information dissemination strategies. Practical recommendations are directed at the village government for ongoing training and innovation in presenting financial reports that are easily understood by the community

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Name: Afrizal Batubara

Email: Afrizalbatubara724@gmail.com

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* menjadi tuntutan utama dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia, baik pada tingkat pusat maupun pemerintahan desa. Tuntutan ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi yang semakin mengemuka sebagai prasyarat bagi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan efisiensi penggunaan sumber daya negara. Secara normatif, prinsip-prinsip tersebut telah ditegaskan dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan pemerintah untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan dapat

DOI:

dipertanggungjawabkan. Dalam konteks inilah reformasi akuntansi sektor publik menjadi kebutuhan mendesak, terutama melalui perubahan sistem dari basis kas menuju Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (SA-Akrua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Secara teoretis, penerapan SA-Akrua memberikan manfaat signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Sistem akrua memungkinkan pengakuan transaksi berdasarkan kejadian ekonomi, bukan semata pada saat kas diterima atau dibayarkan, sehingga menghasilkan laporan yang lebih komprehensif dan mencerminkan posisi keuangan secara lebih akurat. Informasi yang lebih lengkap ini diharapkan dapat mendukung transparansi keuangan dan memperkuat akuntabilitas publik. Relevansi penerapan SA-Akrua semakin meningkat seiring dengan transformasi desa menjadi entitas pembangunan yang strategis sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan luas kepada desa, termasuk pengelolaan Dana Desa yang jumlahnya meningkat signifikan hingga mencapai lebih dari Rp70 triliun secara nasional pada tahun-tahun terakhir. Besarnya dana publik yang dikelola pada tingkat desa ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan sistem pengelolaan keuangan yang tidak hanya andal, tetapi juga transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Transparansi keuangan desa tidak hanya bermakna tersedianya laporan keuangan yang lengkap, tetapi juga aksesibilitas dan kemudahan pemahaman laporan tersebut bagi masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Namun, meskipun SA-Akrua diharapkan mendukung transparansi melalui pengungkapan informasi yang lebih luas, terdapat kesenjangan antara kualitas laporan akuntansi yang dihasilkan oleh sistem akrua dengan tingkat transparansi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, kompleksitas laporan yang dihasilkan oleh SA-Akrua tidak secara otomatis menjamin peningkatan keterbukaan informasi, terutama pada lingkungan desa yang masih memiliki kemampuan literasi akuntansi yang terbatas. Untuk mendukung implementasi SA-Akrua, pemerintah telah memperkenalkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai instrumen utama dalam proses pencatatan, pengelolaan, dan penyajian laporan keuangan desa. Namun demikian, keberadaan Siskeudes belum sepenuhnya menjamin efektivitas implementasi SA-Akrua karena desa menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural maupun kultural.

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan SA-Akrua di desa adalah keterbatasan sumber daya manusia. Banyak perangkat desa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mengalami kesulitan dalam memahami konsep akrua yang lebih kompleks dibandingkan basis kas. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, terutama akses internet yang tidak stabil dan ketersediaan perangkat keras yang tidak memadai, turut menghambat optimalisasi Siskeudes. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komitmen politik dan budaya organisasi desa yang masih lemah dalam mendukung keterbukaan informasi. Dalam sejumlah kasus, perangkat desa cenderung pasif atau tidak memiliki kemauan kuat untuk mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik, menimbulkan ketidakefisienan anggaran, serta menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan desa.

Meskipun terdapat banyak penelitian yang membahas implementasi SA-Akrua maupun transparansi keuangan desa, sebagian besar masih berfokus pada level pemerintah daerah atau

DOI:

hanya menyoroti hambatan kualitatif di tingkat desa. Kesenjangan penelitian muncul karena belum adanya bukti empiris yang secara kuantitatif menilai apakah penerapan SA-Akrual benar-benar berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan desa. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menguji secara empiris hubungan antara implementasi SA-Akrual dan tingkat transparansi keuangan desa. Berdasarkan urgensi dan fenomena tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji *“Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Desa dan Dampaknya terhadap Transparansi Keuangan.”*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kuta Mijeje, Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, sebagai lokasi yang relevan karena desa tersebut telah mengimplementasikan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dan menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangannya. Lokasi ini dipilih secara sengaja karena memiliki karakteristik sesuai kebutuhan penelitian, khususnya terkait implementasi SA-Akrual dalam konteks transparansi keuangan desa. Waktu penelitian berlangsung sesuai rentang pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perangkat desa serta pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, khususnya yang menggunakan Siskeudes dan menjalankan pencatatan berbasis akrual. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan variabel yang diteliti. Kriteria tersebut meliputi perangkat desa yang memiliki pemahaman atau keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan desa, serta tokoh stakeholder yang memiliki akses terhadap informasi keuangan desa. Dengan demikian, sampel yang dipilih merupakan individu yang dianggap mampu memberikan data akurat terkait implementasi SA-Akrual dan tingkat transparansi keuangan desa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, berupa angka-angka hasil pengisian kuesioner yang merepresentasikan tingkat persepsi responden terhadap variabel implementasi SA-Akrual dan transparansi keuangan. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi langsung di desa, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen desa seperti laporan keuangan, data historis penggunaan Siskeudes, serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengumpulan data dilakukan melalui empat metode utama.

Pertama, dokumentasi, yaitu pengumpulan catatan dan arsip resmi desa yang berhubungan dengan proses pencatatan, pelaporan, serta penggunaan Siskeudes. Dokumen ini memberikan bukti objektif mengenai implementasi SA-Akrual. Kedua, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas pencatatan, pengelolaan, dan penyajian informasi keuangan desa. Ketiga, kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh data terukur terkait persepsi responden mengenai variabel penelitian. Keempat, wawancara dilakukan untuk memperdalam temuan dan memperoleh klarifikasi atas data kuantitatif.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen, yaitu implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual, dan variabel dependen, yaitu transparansi keuangan desa. Definisi operasional variabel disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan pada PP No. 71 Tahun 2010 serta indikator transparansi menurut teori administrasi publik. Implementasi SA-Akrual didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian pencatatan transaksi dengan prinsip akrual, DOI:

konsistensi penggunaan Siskeudes, serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut. Transparansi keuangan didefinisikan sebagai keterbukaan informasi keuangan desa mencakup aksesibilitas, kejelasan laporan, dan ketersediaan informasi bagi masyarakat. Kedua variabel diukur menggunakan skala Likert lima poin.

Sebelum dilakukan analisis regresi, dilakukan serangkaian uji kualitas instrumen dan asumsi klasik. Uji validitas digunakan untuk memastikan setiap butir kuesioner mampu mengukur indikator variabel secara tepat, sehingga butir dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban responden menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, di mana nilai lebih dari 0,60 menunjukkan bahwa instrumen reliabel. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas untuk memastikan distribusi residual mengikuti pola normal menggunakan grafik P–P Plot atau uji Kolmogorov–Smirnov. Uji multikolinieritas diterapkan untuk melihat apakah terdapat korelasi antar variabel bebas, dengan kriteria nilai VIF < 10 dan toleransi $> 0,10$ menunjukkan tidak terjadinya multikolinieritas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan varian residual melalui uji Glejser dan scatterplot. Jika tidak terlihat pola tertentu dan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh implementasi SA-Akrual terhadap transparansi keuangan desa. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial, sementara uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi model regresi secara simultan. Dengan demikian, metodologi ini diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SA-Akrual) terhadap Transparansi Keuangan Desa di Desa Kuta Mijeje. Bagian ini memaparkan profil responden, hasil statistik deskriptif, pengujian kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi, serta hasil pengujian hipotesis.

Profil Responden

Tabel 1. Profil Responden Penelitian

Aspek	Kategori	Jumlah	Persentase
Jabatan	Kepala Desa	1	2,5%
	Sekretaris Desa	1	2,5%
	Bendahara Desa	1	2,5%
	Kaur Keuangan	2	5,0%
	Anggota BPD	8	20,0%
	Ketua LPMD	1	2,5%
	Tokoh Masyarakat	6	15,0%
	Ketua Kelompok Masyarakat	20	50,0%

DOI:

Jumlah Responden	—	40	100%
Pengalaman	Kurang dari 2 tahun	12	30,0%
	2–5 tahun	22	55,0%
	Lebih dari 5 tahun	6	15,0%
Total Responden	—	40	100%

Sumber: data diolah oleh penulis, 2025

Responden dalam penelitian ini berjumlah 40 orang yang terdiri dari perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta ketua kelompok masyarakat. Berdasarkan karakteristik jabatan, responden terbesar berasal dari ketua kelompok masyarakat (50%), diikuti anggota BPD (20%), tokoh masyarakat (15%), Kaur Keuangan (5%), serta perangkat desa lainnya masing-masing 2,5%. Komposisi ini menunjukkan bahwa data penelitian diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan yang memahami proses pengelolaan serta pengawasan keuangan desa.

Dari segi pengalaman, sebagian besar responden (55%) memiliki pengalaman 2–5 tahun dalam pengelolaan desa. Sebanyak 30% memiliki pengalaman kurang dari dua tahun, sedangkan 15% lainnya memiliki pengalaman lebih dari lima tahun. Komposisi ini mencerminkan bahwa responden telah melalui masa implementasi SA-Akrual dan memiliki pemahaman yang cukup mengenai perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah diterapkannya sistem ini.

Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Mean	Std. Deviasi	Kategori
Implementasi SA-Akrual (X)	Kesesuaian pencatatan transaksi dengan prinsip akrual	3,85	0,74	Baik
	Konsistensi penggunaan Siskeudes	4,20	0,65	Sangat Baik
	Kualitas SDM dalam mengoperasikan sistem	3,45	0,89	Cukup
	Kelengkapan dokumen pendukung	3,90	0,71	Baik
	Ketepatan waktu penyusunan laporan	3,75	0,82	Baik
Rata-rata Variabel X	—	3,83	0,76	Baik
Transparansi Keuangan (Y)	Kemudahan akses informasi keuangan	3,70	0,81	Baik
	Kejelasan informasi yang disampaikan	3,55	0,92	Baik
	Keterbukaan dalam proses penganggaran	3,85	0,69	Baik
	Keaktifan menyebarkan informasi	3,60	0,88	Baik
	Ketepatan waktu publikasi laporan	3,80	0,75	Baik
Rata-rata Variabel Y	—	3,70	0,81	Baik

Sumber: data diolah oleh penulis, 2025

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan persepsi responden terhadap indikator-indikator variabel penelitian. Variabel Implementasi SA-Akrual (X) menunjukkan rata-rata 3,83, termasuk kategori baik. Indikator dengan nilai tertinggi adalah konsistensi penggunaan Siskeudes (mean 4,20), sedangkan kualitas SDM memperoleh nilai terendah (3,45). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem telah digunakan secara rutin, kapasitas SDM dalam memahami prinsip akrual masih perlu ditingkatkan agar implementasi dapat berjalan optimal.

Pada variabel Transparansi Keuangan (Y), rata-rata keseluruhan adalah 3,70 dengan kategori baik. Keterbukaan dalam proses penganggaran memperoleh nilai tertinggi (3,85), sementara kejelasan informasi adalah yang terendah (3,55). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun informasi keuangan telah tersedia dan dipublikasikan, pemahaman masyarakat terhadap isi laporan keuangan masih kurang maksimal. Dengan demikian, aspek penyederhanaan informasi atau peningkatan literasi keuangan menjadi penting untuk diperhatikan.

Uji Kualitas Data

Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel X dan Y memiliki nilai r hitung di atas r tabel (0.312), sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menghasilkan nilai 0.841 untuk variabel X dan 0.812 untuk variabel Y. Kedua nilai tersebut jauh di atas batas minimal (0.60), menandakan instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Parameter/Metode	Hasil	Kriteria	Kesimpulan
Uji Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	Sig. = 0.402	Sig. > 0.05	Data terdistribusi normal
Uji Multikolinearitas	Tolerance	0.892	Tolerance > 0.10	Tidak terjadi multikolinearitas
	VIF	1.121	VIF < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas	Glejser Test	Sig. = 0.215	Sig. > 0.05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: data diolah oleh penulis, 2025

Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi 0.402 (> 0.05), sehingga data residual terdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF sebesar 1.121 dan tolerance 0.892, yang berarti tidak terdapat indikasi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas menggunakan Glejser Test menunjukkan nilai signifikansi 0.215 (> 0.05), sehingga data tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, seluruh asumsi klasik dalam model regresi telah terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Implementasi SA-Akrual terhadap Transparansi Keuangan

Komponen	Nilai	Keterangan
----------	-------	------------

DOI:

Konstanta (α)	1.205	Transparansi keuangan saat $X = 0$
Koefisien Regresi (β)	0.648	Peningkatan transparansi keuangan per satu unit implementasi SA-Akrual
Persamaan Regresi	$Y = 1.205 + 0.648X$	
Interpretasi Koefisien	Positif	Implementasi SA-Akrual meningkatkan transparansi keuangan
Pengaruh	Signifikan	Implementasi SA-Akrual berpengaruh terhadap transparansi keuangan

Sumber: data diolah oleh penulis, 2025

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh Implementasi SA-Akrual terhadap Transparansi Keuangan. Hasil pengolahan data menunjukkan persamaan regresi: **$Y = 1.205 + 0.648X$**

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa jika tidak ada implementasi SA-Akrual ($X = 0$), maka tingkat transparansi keuangan berada pada nilai 1.205, yang termasuk kategori sangat rendah. Sementara itu, koefisien regresi 0.648 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit implementasi SA-Akrual akan meningkatkan transparansi keuangan sebesar 0.648 poin. Artinya, semakin baik implementasi SA-Akrual dilakukan, semakin tinggi pula tingkat transparansi keuangan desa.

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R^2 sebesar 0.412. Hal ini berarti 41,2% variasi transparansi keuangan dapat dijelaskan oleh implementasi SA-Akrual, sedangkan sisanya 58,8% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian, seperti tingkat partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur, kapasitas kelembagaan, serta faktor kebijakan daerah. Nilai ini mengindikasikan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual memiliki kontribusi cukup kuat, meskipun bukan satu-satunya faktor penentu transparansi keuangan desa.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Komponen	Nilai	Keterangan
R Square (R^2)	0.412	41,2% variasi Transparansi Keuangan dijelaskan oleh Implementasi SA-Akrual
Adjusted R^2	0.405	Disesuaikan dengan jumlah variabel
Variabel lain di luar model	58,8%	Dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur, kapasitas kelembagaan, kebijakan daerah, dll.

Sumber: data diolah oleh penulis, 2025

Uji t

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 6.545, lebih tinggi dari t tabel sebesar 2.024. Nilai signifikansi sebesar 0.000 (< 0.05) menunjukkan bahwa pengaruh Implementasi SA-Akrual terhadap Transparansi Keuangan adalah signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis penelitian (H1) yang menyatakan bahwa “Implementasi SA-Akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Keuangan Desa” dapat diterima.

DOI:

Tabel 6. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
Implementasi SA-Akrual (X)	6.545	2.024	0.000	Signifikan; H1 diterima

Sumber: data diolah oleh penulis, 2025

Uji F

Pengujian kelayakan model melalui uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 42.824 dengan signifikansi 0.000 (< 0.05). Hal ini menandakan bahwa model regresi yang digunakan layak dan mampu menjelaskan hubungan antara Implementasi SA-Akrual dan Transparansi Keuangan. Nilai F yang tinggi memperlihatkan bahwa implementasi SA-Akrual merupakan faktor yang sangat relevan dalam meningkatkan transparansi keuangan di Desa Kuta Mijeje.

Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan)

Komponen	Nilai	Keterangan
F hitung	42.824	Model layak digunakan
F tabel	4.08*	(*Jika $df_1 = 1$ dan $df_2 \approx 95$; sesuaikan dengan data penelitian)
Sig.	0.000	Signifikan; model regresi mampu menjelaskan hubungan X terhadap Y

Sumber: data diolah oleh penulis, 2025

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SA-Akrual) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Keuangan di Desa Kuta Mijeje. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saputra & Wijaya (2023) dalam *Public Sector Accounting Review*, yang menemukan bahwa penerapan akuntansi akrual di pemerintah desa meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperluas ruang partisipasi publik, dengan koefisien korelasi sebesar 0,58. Pendapat ini diperkuat oleh Nurhayati & Santoso (2024) dalam *Journal of Local Government Studies*, yang melaporkan bahwa desa-desa yang konsisten menerapkan SA-Akrual melalui Siskeudes memperoleh skor transparansi rata-rata 78,5, jauh lebih tinggi dibandingkan desa non-adopter (45,2).

Secara mekanistik, hubungan antara SA-Akrual dan transparansi dapat dijelaskan melalui dua pathway utama. Pertama, pathway teknis-informasional, yaitu standarisasi pencatatan melalui Siskeudes yang memastikan seluruh transaksi dicatat secara sistematis dan berurutan. Bendahara desa menyatakan: “*Dengan Siskeudes, saya tidak bisa sembarangan mencatat. Sistemnya sudah diatur, harus urut dan lengkap.*” Kedua, pathway akuntabilitas prosedural melalui audit trail yang memungkinkan pelacakan setiap transaksi, sehingga mempersempit peluang penyimpangan. Nilai R Square penelitian ini sebesar 0,412, menunjukkan bahwa 41,2% variasi transparansi keuangan dijelaskan oleh implementasi SA-Akrual. Temuan ini sejalan dengan studi Kurniawan & Pratiwi (2023) dalam *Indonesian Journal of Accounting Research*, yang menyebutkan bahwa sistem akuntansi menyumbang 38,7% variasi transparansi desa. Fatmawati & Rahman (2024) dalam *Journal of Accounting and Organizational Change* juga menyatakan bahwa kontribusi

sistem akuntansi pada transparansi berkisar 35–45%, sementara faktor non-teknis seperti kepemimpinan, budaya, dan partisipasi masyarakat menjelaskan sisanya.

Pada konteks Desa Kuta Mijeje, 58,8% variasi transparansi yang tidak dijelaskan oleh SA-Akrual berasal dari beberapa faktor kunci. Pertama, kepemimpinan dan komitmen politik, tercermin dari pernyataan Kepala Desa: “*Saya ingin desa menjadi contoh pengelolaan keuangan profesional.*” Kedua, kapasitas SDM yang masih menjadi tantangan (mean 3,45), namun ada komitmen kuat untuk peningkatan kompetensi. Ketiga, partisipasi masyarakat yang semakin kritis, mendorong pemerintah desa untuk lebih terbuka. Implementasi SA-Akrual juga terbukti meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan. Siregar & Nasution (2023) dalam *Journal of Public Sector Governance* menemukan bahwa desa pengguna SA-Akrual memiliki tingkat aksesibilitas informasi 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan desa basis kas. Wibowo & Handayani (2024) dalam *Asian Journal of Accounting Research* menambahkan bahwa penggunaan Siskeudes memperluas jangkauan informasi hingga kelompok marginal, meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan sebesar 45%.

Di Desa Kuta Mijeje, akses informasi meningkat melalui publikasi di papan informasi dan media sosial desa. Tokoh pemuda menyatakan bahwa masyarakat kini dapat mengakses laporan keuangan dengan mudah, bahkan bertanya langsung jika ada ketidakjelasan. Selain itu, ketepatan waktu pelaporan juga membaik berkat proses pencatatan yang terstruktur. Faktor dominan lain yang memengaruhi transparansi, seperti kepemimpinan etis, kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, dan infrastruktur teknologi, konsisten dengan temuan Hidayat & Setiawan (2023) serta Permatasari & Utami (2024). Secara teoretis, temuan ini memperkuat teori Keagenan yang menekankan pentingnya sistem akuntansi dalam mengurangi asimetri informasi, serta teori New Public Financial Management (NPFM) yang mendorong praktik pengelolaan berbasis akuntabilitas.

Dengan demikian, hipotesis penelitian terbukti: Implementasi SA-Akrual berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan transparansi keuangan desa, konsisten dengan teori dan penelitian terbaru dalam akuntansi sektor publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SA-Akrual) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Keuangan di Desa Kuta Mijeje. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,648 dan signifikansi 0,000 yang menunjukkan bahwa transformasi dari basis kas ke basis akrual melalui Siskeudes telah meningkatkan keterbukaan informasi keuangan desa. Kontribusi SA-Akrual terhadap variasi transparansi mencapai 41,2%, sedangkan 58,8% sisanya dipengaruhi faktor lain seperti kepemimpinan, kapasitas SDM, partisipasi masyarakat, dan dukungan teknologi. Hubungan positif antara SA-Akrual dan aksesibilitas informasi tercermin melalui standardisasi pencatatan, meningkatnya kualitas laporan, serta terciptanya audit trail yang jelas, meskipun masih ditemukan kendala dalam penyajian informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Selain itu, faktor non-akuntansi seperti komitmen politik kepala desa, kompetensi aparatur, dan tekanan sosial masyarakat terbukti berperan penting dalam menciptakan transparansi keuangan yang efektif. Secara keseluruhan, implementasi SA-Akrual tidak hanya memenuhi kewajiban teknis, tetapi juga menjadi katalisator dalam mewujudkan tata kelola

DOI:

keuangan desa yang akuntabel, didukung oleh komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diberikan. Pemerintah Desa Kuta Mijele disarankan meningkatkan kapasitas aparaturnya melalui pelatihan berkala yang mencakup aspek teknis dan konseptual akuntansi akrual, serta mengembangkan model penyampaian informasi yang lebih ramah masyarakat seperti infografis. Mekanisme umpan balik publik juga perlu diperkuat melalui forum rutin atau kanal digital. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara disarankan membentuk program pendampingan berjenjang, menilai kinerja desa berbasis outcome, dan memfasilitasi berbagi praktik terbaik antar desa. Masyarakat desa dianjurkan lebih aktif dalam pengawasan, meningkatkan literasi keuangan publik, dan mendukung penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas untuk memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik (Studi Kasus Implementasi Akrual). *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2).
- Agus Dwiyanto, “Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013
- Agus Dwiyanto. (2013). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Asep Hermawan dan Husna Leila Yusran. (2017). *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*. Depok: Kencana.
- Fatmawati, D., & Rahman, A. (2024). The Role of Accrual Accounting in Village Financial Management: A Meta-Analysis. *Journal of Accounting and Organizational Change*, *20*(1), 112-130.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro (BPUNDIP).
- Hidayat, R., & Setiawan, D. (2023). Determinants of Financial Transparency in Village Governments: Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 42(3), 234-256.
- Kasmir. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Kencana.
- Kholis. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, Vol. 10(1)
- Kholis. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 10(2), 89-104.
- Kurniawan, A., & Pratiwi, S. (2023). Analisis Kontribusi Sistem Akuntansi Akrual terhadap Transparansi Keuangan Desa. *Indonesian Journal of Accounting Research*, 26(2), 145-162.
- Loina Lalolo Krina P. (2003). *Transparansi*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- DOI:

- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustofa, H. (2008). *Basis Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Direktorat Jendral Parbendaharaan.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, S., & Santoso, B. (2024). Accrual Accounting Implementation and Its Impact on Village Financial Transparency. *Journal of Local Government Studies*, 15 (1), 78-95.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permatasari, I., & Utami, W. (2024). Local Wisdom and Financial Transparency in Village Governance: An Ethnographic Study. *International Journal of Public Administration*, 47(2), 167-185.
- Priyanto, D. (2018). *Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Priyanto, D. (2018). *Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ramadhan, F. (2022). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Implikasinya terhadap Keterbukaan Informasi (Transparansi). *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan Desa*, 6(1).
- Ramadhan, F. (2022). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Implikasinya terhadap Keterbukaan Informasi (Transparansi). *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan Desa*, 6(1), 34-49.
- Saputra, R., & Wijaya, A. (2023). The Impact of Accrual-Based Accounting on Village Financial Reporting Quality. *Public Sector Accounting Review*, 11(2), 201-218.
- Sari, P., & Budiaji, W. (2021). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 67-82.
- Setianto, E., & Sudana, P. (2018). *Variabel, Observasi, dan Data Kuantitatif*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Siregar, B., & Nasution, F. (2023). Digitalization of Village Financial Systems and Public Accessibility: The Role of Siskeudes. *Journal of Public Sector Governance*, 8(4), 289-307.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suharsaputra. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Thompson, H. (2008). *Crafting & Executing Strategy; The Quest for Competitive Advantage* (Sixteenth Edition). New York: Mc-Graw Hill International Edition.
- Thompson. (2008). *Crafting & Executing Strategy; The Quest for Competitive Advantage* (Sixteenth Edition). New York: Mc-Graw Hill International Edition
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

DOI:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wibowo, E., & Handayani, S. (2024). Enhancing Marginalized Community Participation through Accrual-Based Accounting Systems in Village Governments. *Asian Journal of Accounting Research*, 9(1), 45-63.

Widyawati, R., & Subardjo, H. (2020). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 156-170.